

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pandemi *covid'19* merupakan salah satu wabah penyakit yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Tiongkok (Auerbach et al., 2022). Wabah virus *Covid* 19 ini menyebar di Indonesia. Indonesia mengkonfirmasi kasus virus corona pertamanya, pada awal Maret tahun 2020 (Djalante et al., 2020). Hal tersebut didukung melalui pengumuman resmi bahwa terdapat 2 kasus positif *covid 19* (Aloui et al., 2022). Berangkat dari 2 kasus ini akhirnya virus *covid 19* menyebar semakin luas di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tentu adanya pandemic berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu sektor kehidupan yang terdampak adalah sektor perekonomian. Menurut laporan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), kehadiran wabah tersebut berdampak pada risiko krisis ekonomi yang ditandai dengan terhentinya kegiatan produksi di Indonesia. (Sugianto et al., 2023).

Adanya Pandemi *covid 19* mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya penanganan. Upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi dimulai dari diberlakukannya kebijakan PSBB, PPKM darurat, PPKM *Micro*, PPKM level 1-4 hingga *micro lockdown* (Ramayandi & Negara, 2022). Adanya kebijakan tersebutlah yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kondisi yang dimana juga mengharuskan masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah (*stay at home*) dan mengalihkan seluruh kegiatan di luar rumah menjadi kegiatan yang dilakukan dari rumah (*work from home*). Hal inilah yang selanjutnya, menjadi penyebab terjadinya penurunan jumlah produksi sehingga berdampak pada ketidakstabilan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari data rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di bawah ini. Terlihat dengan jelas berdasarkan data

BPS tersebut bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada awal mula masa pandemi hingga saat ini (Modjo, 2020).

Menurut (Rahmanti et al., 2021) adanya pandemi *Covid 19* menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak stabil. Pada tahun 2022, Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal I/2022 tercatat Rp4.513 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp2.819 triliun. BPS juga menyatakan bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal I/2022 tumbuh sebesar 5,01%. Data tersebut menunjukkan bahwa pandemi sangat berdampak pada sektor perekonomian (Modjo, 2020). Laju pertumbuhan ekonomi yang naik dan turun disebabkan oleh adanya pandemi dan saat ini kita telah memasuki masa endemi. Kita harus mampu menyesuaikan diri untuk dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan normal seperti sebelum adanya pandemi *covid 19*

Gambar 1. 1

Laju Pertumbuhan dan Nilai PDB Triwulanan



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Kata “endemik” berasal dari bahasa Yunani yaitu *endemos*, yang berarti “dalam populasi”. Penyakit yang tergolong endemik adalah penyakit yang relatif sering terjadi di suatu wilayah dengan pola yang cukup dapat diprediksi. (Steere-Williams, 2022). Virus dapat berubah dari pandemi menjadi endemik apabila jika dilihat pertumbuhannya semakin berkurang. Tidak semua negara memasuki epidemi pada waktu yang sama karena banyak faktor seperti lingkungan, mutasi virus dan waktu vaksinasi yang berbeda (McGowan & Bambra, 2022). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa transisi pandemi-endemi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh dr. Siti Nadia Tarmizi (Juru Bicara Vaksinasi Covid 19 Kementerian Kesehatan), pemerintah beserta para ahli masih terus membahas indikator terbaik sehingga dapat dikatakan endemi (Putri et al., 2021). Pada masa transisi dari masa pandemi ke endemi tentu berdampak pada pola kebiasaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas pendapatan ekonominya didapatkan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan skala entitas usaha yang kini mendominasi dan menjadi tulang punggung di Indonesia (Aisyah, 2020). Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa selama ini, UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. Saat ini, UMKM juga menghadapi fenomena pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian. Akibat dari fenomena tersebut, UMKM menghadapi situasi yang lebih kompleks, hampir 96% UMKM berdampak negatif terhadap usahanya, dan 75% diantaranya mengalami penurunan penjualan produk. (Wahyono, 2021).

## **Gambar 1. 2**

### **Kontribusi UMKM Terhadap PDB. 2010-2020**

### Kontribusi UMKM terhadap PDB. 2010-2020\*

\*merupakan target



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

lokadata

Sumber: (Lokadata, 2020)

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah juga berperan penting dalam menggerakkan perekonomian di DIY. Kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi DIY sebesar 79,6 persen dari Produk Domestik Regional Bruto PDRB DIY. Jumlah unit usaha kecil dan menengah meningkat rata-rata 8,45% per tahun, dan penjualan meningkat rata-rata 1,37%. Terhadap penyerapan tenaga kerja, UMKM mempunyai andil sebesar 23-25 persen dalam menyerap Angkatan kerja. Adanya pandemic memicu dampak negative terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada sektor UMKM khususnya pada kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dengan angka pasien positif *Covid 19* tertinggi di Yogyakarta (Karuniawati et al., 2020).

Selanjutnya hal inilah yang menjadi permasalahan di kabupaten Bantul yang membutuhkan penyelesaian dengan cara yang relevan. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam sektor perekonomian di Indonesia (Aisyah, 2020). Yang artinya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemic UMKM memiliki peran yang sangat penting. Menjadi tantangan tersendiri bagi para stakeholder dan juga masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri. Berangkat dari beragam faktor permasalahan tersebut dibutuhkan upaya penanganan oleh pemerintah. Namun faktanya terdapat keterbatasan-keterbatasan pemerintah dalam hal itu sehingga

dibutuhkannya keterlibatan stakeholder lain untuk turut serta berkolaborasi dalam rangka pemulihan ekonomi UMKM.

Salah satu contoh upaya penanganan yg telah dilakukan pemerintah yaitu melalui diluncurkannya sebuah aplikasi marketplace baru yaitu Bantul Online Shop (BOS) pada tanggal 22 Februari 2022. Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul, Bank BPD DIY, PT. WABI teknologi Indonesia serta Forkom UMKM Bantul. Aplikasi ini ditujukan bagi para pedagang yang ingin melakukan jual beli secara digital, Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomian, perdagangan (jual beli), serta memungkinkan kegiatan bisnis di Kabupaten Bantul dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga tidak hanya dilakukan secara tradisional (perdagangan offline) juga dapat dilakukan secara online melalui media digital. (bantulkab.go.id, 2022).

Selain itu dalam rangka pemulihan ekonomi UMKM pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya penanganan lainnya yaitu melalui program podjok konsultasi, pendampingan terhadap para pelaku UMKM, memfasilitasi kegiatan pelatihan-pelatihan serta langkah-langkah kolaboratif lainnya baik kolaborasi bersama sesama lembaga internal pemerintahan maupun eksternal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat tingginya kasus aktif di Kabupaten Bantul Yogyakarta yang berdampak pada sektor perekonomian terutama pada UMKM membuat ini perlu adanya penanggulangan serius yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan penanggulangan Pandemi *Covid 19* agar dapat lebih optimal. Namun yang menjadi penting juga adalah sejauh ini collaborative governance pemerintah kabupaten bantul dalam rangka pemulihan ekonomi UMKM pada masa endemic studi kasus melalui Aplikasi Bantul Online Shop (BOS)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengidentifikasi gerakan kolaboratif pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam rangka pemulihan ekonomi UMKM pada masa endemi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kontribusi Pemerintah Daerah dalam hal upaya pemulihan ekonomi di masa endemi mengingat bahwa adanya pandemi sangat berdampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat terutama di bidang Ekonomi sehingga dibutuhkan peran dari seluruh elemen stakeholder dan masyarakat sehingga melalui gerakan kolaboratif yang telah dilakukan dapat menjadi salah satu gerakan yang solutif dan bermanfaat dalam hal pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat dari penelitian ini secara praktis melalui hasil penelitian yang didapatkan nantinya dapat menjadi bahan referensi dalam membangun pola berfikir yang inovatif bagi stakeholders maupun seluruh elemen masyarakat.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Suatu penelitian tentunya perlu untuk memberikan beberapa perbandingan antara penelitian saat ini dengan beberapa penelitian terdahulu agar posisi serta *novelty* yang didapatkan semakin kuat, berikut kajian serta analisis perbandingan antara penelitian penyusun dan penelitian terdahulu, Adapun studi Pustaka yang menjadi bahan literature dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Tinjauan Pustaka**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian terdahulu	Penelitian penyusun
1.	(Marginingsih, 2021)	Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid 19 Pada Sector UMKM	Membahas tentang upaya pemulihan ekonomi terutama pada UMKM	Kajian ini lebih menekankan pada upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi melalui sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai bentuk usaha untuk penguatan UMKM. Program Pemulihan Ekonomi	Kajian peneliti lebih menekankan terhadap upaya pemulihan ekonomi UMKM dalam hal pengimplementasiannya melalui sebuah Langkah kolaboratif yang dapat membantu penanggulangan ekonomi di kabupaten Bantul

				Nasional (PEN) tersebut merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku UMKM	
2.	(Sutrisno, 2020)	Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata	Membahas tentang upaya-upaya pemulihan ekonomi pada sektor UMKM	Kajian ini lebih menekankan pada strategi pemulihan ekonomi UMKM melalui sebuah langkah yang dimuat	Kajian peneliti akan membahas tentang usaha penanggulangan dampak covid 19 pada sektor ekonomi

				dalam suatu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah pusat seperti: Pemberian bantuan sosial, Insentif perpajakan, Relaksasi dan Restrukturisasi kredit bagi UMKM, Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM serta Penyediaan penyangga produk bagi UMKM	UMKM melalui sebuah produk kebijakan di kabupaten Bantul.
3.	(Arifqi et al., 2021)	Pemulihan Perekonomian Indonesia melalui	Membahas tentang Langkah-langkah	Kajian ini lebih menekankan pada	Kajian penelitian akan membahas

		Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi <i>Covid 19</i>	inovatif dalam pemulihan ekonomi UMKM	Langkah- langkah inovatif pemulihan ekonomi UMKM berbasis Syariah	n tentang Langkah- langkah kolaboratif secara menyeluruh mencakup UMKM secara luas Syariah maupun non Syariah
4.	(Lubis, 2022)	Strategi Pemulihan Ekonomi UMKM Pasa Pandemi <i>Covid 19</i> Melalui Peningkatan Kualitas SDM	Membahas tentang solusi atau strategi Pemulihan Ekonomi pada UMKM pasca Pandemi <i>Covid 19</i>	Kajian ini lebih menekankan bahwa fokus kepada peningkatan kualitas SDM dalam hal pendidikan dan pelatihan merupakan pilihan yang tepat untuk tetap bertahan dan bangkit	Kajian peneliti akan membahas bahwa dalam hal upaya pemulihan ekonomi UMKM haruslah berfokus pada peningkatan pengetahuan serta kualitas pemasaran

				dalam masa Pandemi Covid 19	produk UMKM
5.	(Siagian et al., 2021)	Strategi Pemulihan Pemasaran UMKM di Masa Pandemi Covid 19 Pada Sektor Ekonomi Kreatif	Membahas tentang upaya pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas pemasaran produk	Kajian ini membahas tentang upaya pemulihan ekonomi melalui strategi pemasaran berdasarkan prinsip ekonomi kreatif secara luas. Penelitian ini lebih menekankan tata cara teknis strategi pemasaran yang baik namun belum menspesifikasikan <i>marketplace</i> mana yang	Kajian ini akan membahas tentang strategi kolaboratif antar seluruh <i>stakeholder</i> dalam rangka pemulihan ekonomi UMKM pada masa endemic di kabupaten Bantul secara spesifik. .

				akan digunakan sebagai wadah pemasaran	
6.	(Utama et al., 2022)	Penerapan Aplikasi Lamikro sebagai Solusi Pemulihan UMKM Pasca Pandemi	Membahas tentang upaya pemulihan Ekonomi UMKM pasca Pandemi	Kajian ini lebih menekankan pada peningkatan kualitas pengetahuan pembukuan atau akuntansi sebagai solusi dalam pemulihan ekonomi UMKM	Kajian Peneliti lebih menekankan pada peningkatan pengetahuan tentang Langkah-langkah kolaboratif yang digunakan sebagai solusi dalam pemulihan ekonomi UMKM
7.	(Anggraeni et al., 2021)	Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa	Membahas tentang upaya pemerintah dalam menangani dampak	Kajian ini lebih menekankan pada kebijakan-kebijakan	Kajian Peneliti akan membahas tentang implementa

		Pandemi <i>Covid 19</i> di Indonesia	negatif pandemi terhadap ekonomi UMKM Di Indonesia	pemulihan ekonomi UMKM yg dilakukan pemerintah seperti pemberian bantuan sosial terhadap para pelaku UMKM	si dari implementasi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi UMKM
8.	(Imelda et al., 2021)	Strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Terhadap UMKM Pada Masa Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi <i>Covid 19</i>	Membahas tentang strategi pemulihan ekonomi UMKM pasca Pandemi <i>Covid 19</i>	Kajian ini lebih menekankan pada upaya pemulihan ekonomi UMKM yang dilakukan pemerintah berfokus pada pemberian bantuan serta pendampingan- pendamping	Kajian peneliti akan membahas tentang efektifitas strategi pemulihan ekonomi UMKM pada masa endemi melalui Langkah k olaboratif antar <i>stakeholders</i> di

				an sebagai upaya dalam memperluas wawasan para pelaku UMKM	kabupaten Bantul.
9.	(Atmojo et al., 2022)	Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19: <i>Branding</i> UMKM melalui Media Sosial di desa Hangorejo	Membahas tentang upaya pemulihan ekonomi UMKM	Kajian ini lebih menekankan upaya pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas branding produk dengan memanfaatkan sosial media yang ada	Kajian peneliti akan membahas tentang upaya pemulihan ekonomi dengan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui upaya-upaya kolaboratif antar stakeholders di Kabupaten Bantul
10.	(Ibrahim, 2022)	Pemberdayaan Usaha	Membahas tentang upaya	Kajian ini lebih	Kajian peneliti

		Mikro Kecil Menengah melalui Pendekatan Inovasi Sosial dan <i>Collaborative Government</i>	pemulihan Ekonomi UMKM melalui Tindakan pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan <i>Collaborative Government</i>	menekankan pada fokus relasi pemberdayaan UMKM, Inovasi sosial dan kolaborasi antar sector dalam memulihkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemic <i>covid 19</i>	akan membahas tentang pemulihan ekonomi UMKM melalui pendekatan yang adaptif dan kolaboratif antar seluruh elemen yang terlibat
11.	(Hermawan et al., 2022)	Analisis Inovasi Produk, Pemasaran dan Kolaborasi (IP2K) Kunci keberhasilan UMKM pasca pandemi <i>covid 19</i>	Membahas tentang inovasi produk pemasaran dalam upaya pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi	Kajian ini lebih menekankan pada upaya pemulihan ekonomi UMKM melalui inovasi produk, strategi pemasaran	Kajian peneliti akan membahas kolaborasi serta inovasi pemasaran produk terbaru melalui sebuah media

				yang tepat, serta melakukan kolaborasi agar dapat bertahan	digital dengan memanfaatkan teknologi yang ada
12.	(Mariningsih et al., 2021)	Membangun Model Basis Penggunaan Teknologi Digital bagi UMKM dalam Masa Pandemi Covid 19	Membahas tentang upaya pengembangan kualitas ekonomi UMKM berbasis digital	Kajian ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip pengembangan kualitas UMKM yang berbasis digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi	Kajian penelitian akan membahas upaya kolaboratif pemulihan ekonomi UMKM pada masa pandemi di kabupaten Bantul.
13.	(Sukma, 2022)	Pemulihan Perekonomian UMKM kota Medan Pasca Pandemi Covid-19	Membahas tentang upaya-upaya pemulihan ekonomi UMKM	Kajian ini lebih menekankan bahwa upaya pemulihan ekonomi	Kajian penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi kebijakan

			<p>pasca Pandemi</p>	<p>UMKM yang dibuat oleh pemerintah berupa sebuah kebijakan Program PEN dalam hal pengimplem entasiannya masih dirasa kurang maksimal terutama pada kota Medan. Penelitian ini lebih menekanka n apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimple mentasikan program tersebut</p>	<p>yang digagas langsung oleh pemerintah daerah setempat sebagai salah satu solusi lain selain program PEN yang sedang digagas oleh pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menyediaka n solusi dari permasalahana n ekonomi UMKM yang terdampak</p>
--	--	--	--------------------------	---	--

					pada saat pandemi
14.	(Ishak et al., 2021)	Implementasi Model Pentahelix dalam pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid 19	Membahas bahwa upaya-upaya pemulihan ekonomi haruslah dilakukan dengan kolaborasi antar seluruh <i>stakeholder</i> maupun elemen masyarakat	Kajian ini lebih menekankan fokus pengembangan UMKM dalam hal pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi menggunakan model pentahelix	Kajian peneliti akan membahas mengenai upaya-upaya pemulihan ekonomi menggunakan model <i>collaborative governance</i>
15.	(Aisyah, 2020)	Dampak Pandemi Covid-19 bagi UMKM serta Strategi E-Marketing UMKM di Indonesia	Membahas tentang strategi pemasaran UMKM secara digital sebagai salah satu bentuk upaya pemulihan ekonomi	Kajian ini lebih menekankan pada rekomendasi wadah dan juga pemasaran produk secara digital dengan memanfaatkan	Kajian peneliti ini akan membahas bentuk usaha pemulihan ekonomi dengan menggunakan pendekatan <i>collaborativ</i>

				an teknologi yang ada	<i>e governance</i>
16.	(Sundah et al., 2021)	Digitalisasi UMKM sebagai Langkah Mewujudkan Pemulihan dan Resiliensi Pelaku Usaha di Masa Pandemi	Membahas tentang pemanfaatan teknologi digital sebagai salah satu perwujudan dalam pemulihan ekonomi UMKM	Kajian ini lebih menekankan dinamika pengembangan UMKM berbasis digital mulai dari <i>branding</i> hingga marketingnya	Kajian peneliti akan membahas apa saja Langkah-langkah kollaboratif dalam pemulihan ekonomi UMKM pada masa endemi di kabupaten Bantul
17.	(Mansir, 2021)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Digital <i>Marketing</i> dan Media Sosial Sebagai Media Promosi Era Pandemi Covid 19 di	Membahas tentang pemulihan ekonomi UMKM dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, menekankan <i>branding</i> dan	Kajian ini lebih menekankan pada fokus pendampingan terhadap para pelaku UMKM mengenai <i>branding</i> dan	Kajian peneliti akan membahas tentang mengidentifikasi apa saja bentuk collaborative governance dalam

		UMKM Panggunharjo Sewon Bantul	<i>marketing</i> berbasis digital	<i>marketing</i> berbasis digital	pemulihan UMKM di kabupaten Bantul yang sudah dilakukan sejauh ini
18.	(Prakosa et al., 2022)	Penerapan Digital Marketing Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Pada UMKM Kripik Ruky Ngudi Rezeki	Membahas tentang pemulihan ekonomi Pelaku UMKM berbasis digital	Kajian ini lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi digital dengan fokus pembahasan fase transisi offline ke online	Kajian peneliti akan langsung membahas Gerakan kolaboratif dan inovatif dalam pemulihan ekonomi UMKM pada masa endemic di kabupaten Bantul

19.	(Ridlo, 2020)	Dampak <i>Covid 19</i> Terhadap UMKM Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Ide Untuk Menghidupkan Kembali Ekonomi	Membahas tentang bagaimana cara pemulihan perekonomian di sektor UMKM	Kajian ini lebih menekankan terhadap apa saja yang menjadi permasalahan ekonomi UMKM serta memberikan beberapa rekomendasi solusi untuk menghidupkan Kembali ekonomi UMKM dengan Langkah-langkah solutif	Kajian peneliti akan membahas Langkah solutif pemulihan ekonomi UMKM upaya kolaboratif oleh pemerintah kabupaten Bantul,

				<p>untuk memitigasi agar tidak terjadinya gulur tikar secara masal para pelaku UMKM</p>	
20.	(Khasanah, 2020)	<p>Upaya Pemulihan UMKM di Masa Pandemi Covid 19 Melalui Pelatihan Pada Pengrajin Anyaman Pandan</p>	<p>Membahas tentang Langkah-langkah solutif dan inovatif dalam rangka pemulihan ekonomi UMKM</p>	<p>Kajian ini lebih menekankan pada Langkah solutif seperti memasifkan pelatihan-pelatihan bagi para pelaku UMKM yang terdampak akibat adanya Pandemi Covid 19</p>	<p>Kajian ini akan membahas tentang Langkah solutif pemulihan ekonomi UMKM dengan pada masa endemic di kabupaten Bantul</p>

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi melalui sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai bentuk usaha untuk penguatan UMKM. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku UMKM (Marginingsih, 2021). Namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam pengimplementasian Program PEN tersebut seperti belum menyeluruhnya informasi dan Bantuan BLT yang didapatkan oleh para pelaku UMKM sehingga dirasa perlu untuk memperbaiki permasalahan tersebut, dan permasalahan tersebut juga cukup dirasakan dampaknya oleh UMKM di beberapa daerah yang ada di Indonesia (Sukma, 2022).

Terdapat penelitian terdahulu juga yang membahas tentang strategi pemulihan ekonomi melalui pembuatan kebijakan oleh pemerintah (Sutrisno, 2020). Bantuan sosial yang didistribusikan seperti BLT, Insentif perpajakan, Relaksasi dan Restrukturisasi kredit bagi UMKM, Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM serta Penyediaan penyangga produk bagi UMKM (Anggraeni et al., 2021). UMKM juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya terdapat penelitian yang berpendangan bahwa mayoritas merosotnya perekonomian karena Pandemi turut dirasakan oleh para pelaku UMKM berbasis Syariah, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat ini perlu untuk dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi di masa maupun pasca pandemic covid-19 (Arifqi et al., 2021).

Dampak negatif terhadap sektor ekonomi membuat pemerintah harus turut serta melakukan upaya-upaya solutif untuk menangani permasalahan tersebut (Ridlo, 2020) dan (Khasanah, 2020). Menurut penelitian (Lubis, 2022) Pemerintah telah membuat beberapa program untuk menyelesaikan masalah dari dampak yang diterima saat pandemi, Salah satu program pemerintah adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional, salah satu rangkaian aksi untuk memitigasi dampak ekonomi akibat Covid-19. Pemerintah juga mengoperasikan PEN sebagai respon atas menurunnya aktivitas masyarakat yang berdampak pada perekonomian khususnya

sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Tantangan seperti tingginya angka pengangguran akibat pandemi masih ada. Salah satu strategi yang dapat diusulkan oleh peneliti dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi ini melalui peningkatan kualitas SDM sebagai stimulus yang diberikan untuk para UMKM.

Selain itu pandemi merupakan salah satu fase transisi dari offline ke online, kondisi tersebut mewajibkan masyarakat untuk bisa beradaptasi dan beralih ke dunia digital. Sektor ekonomi ialah salah satu sektor yang sangat penting dalam kehidupan kita, adanya pandemi sangat berdampak negative dan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi bertumbuh melambat. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi mayoritas penduduk Indonesia. Mereka dituntut untuk mampu menciptakan solusi terhadap permasalahan tersebut sehingga lahirlah sebuah strategi baru yg digunakan sebagai batu loncatan dalam upaya pemulihan ekonomi (Siagian et al., 2021). Rendahnya kapasitas pengetahuan para pelaku UMKM terkait akuntansi membuat ini perlu untuk menjadi focus pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi UMKM salah satunya dengan memperkuat dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pada UMKM (Utama et al., 2022).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terdampak oleh pandemic, namun tidak hanya pemerintah pusat diperlukan juga keterlibatan pemerintah daerah untuk turut serta berkontribusi dalam menghadapi permasalahan ini. Dalam penelitian (Imelda et al., 2021) berupaya mendalami upaya Pemprov Kaltara dan bagaimana upaya pemulihan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kebijakan dirumuskan untuk mengatasi keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Penanganan pandemi COVID-19 dengan menyalurkan dan mengembangkan dukungan insentif berupa bantuan permodalan dan pelatihan bagi UMKM.

Banyaknya UMKM yang terpaksa berhenti untuk sementara waktu selama pandemic covid-19 menjadi hal yang sangat disayangkan. Hal ini yang kemudian memicu para akademisi maupun berbagai elemen masyarakat lainnya untuk mencari kan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Solusi yang

ditawarkan oleh beberapa peneliti adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada mulai dari pengenalan produk, promosi hingga pemasaran berbasis digital (Atmojo et al., 2022), (Liu & Sukmariningsih, 2021), (Aisyah, 2020), (Sundah et al., 2021), (Mansir, 2021) dan (Prakosa et al., 2022).

Kemudian dalam melakukan upaya penanganan ini tentunya disadari bahwasannya peran dari segala sektor baik itu swasta maupun pemerintah memang perlu dilakukan secara beriringan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat lebih kuat dengan menghasilkan satuan tugas yang dibekali sumber daya mumpuni dan saling melengkapi baik itu menggunakan sumber daya teknologi untuk efisiensi kinerja maupun sumber daya manusia untuk menjadi pelaku di lapangan (Ibrahim, 2022) dan (Hermawan et al., 2022). Terdapat banyak model kolaborasi yang dilakukan oleh para stakeholder salah satunya adalah model *pentahelix*. Menurut (Vani et al., 2020) Model *pentahelix* adalah kolaborasi antar 5 unsur yaitu akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media. Dan pada penelitian (Ishak et al., 2021) mencoba untuk menemukan solusi terhadap permasalahan ekonomi terhadap para pelaku UMKM menggunakan model *pentahelix*. Dan didapatkan hasil bahwa model *pentahelix* dapat menjadi Langkah yang solutif apabila dapat dilaksanakan dengan optimal.

Fakta diatas tentunya memperkuat dasar penelitian ini, yang mana langkah-langkah yang solutif dan inovatif sangat diperlukan mengingat kompleksnya keadaan sebagai dampak yang timbul dari adanya pandemi ini. Penelitian terdahulu banyak yang berfokus pada bagaimana peran pemerintah atau strategi yang ditawarkan untuk menanggulangi permasalahan ekonomi terutama pada sektor UMKM namun pada beberapa penelitian terdahulu tersebut hanya menjelaskan sebatas suatu upaya melalui pengeluaran kebijakan, pemberian bantuan, pendampingan-pendampingan dan belum adanya sebuah produk hukum yang memberikan wadah sebagai bentuk implementasi dari kebijakan tersebut padahal suatu kebijakan yang baik adalah dapat dilihat dari bagaimana pengimplementasiannya. Hal ini tentunya perlu ditinjau bagaimana suatu kebijakan

yang dibuat dapat dijalankan dengan tujuan menekan dampak ekonomi pasca pandemi yang masih berkepanjangan ini.

Kemudian studi kasus yang dipilih yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (DIY), terutama Kabupaten Bantul karena daerah ini merupakan daerah dengan kasus *Covid 19* tertinggi di Yogyakarta. Keadaan ini diperparah dengan angka kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi, serta dampak ekonomi yang dirasakan oleh para pelaku UMKM yang cukup mengkhawatirkan, sehingga kondisi ini memerlukan suatu upaya penanganan yang harus dilakukan oleh *stakeholder* terkait supaya permasalahan ekonomi UMKM dapat segera diselesaikan.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **a. Collaborative Governance**

*Collaborative Governance* didefinisikan oleh Ansell dan Gash (2008) sebagai bentuk pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih otoritas publik terlibat langsung dengan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan deliberatif dan konsensus, berlaku untuk perumusan dan implementasi kebijakan publik atau untuk program dan manajemen properti secara umum. Konsep dan definisi ini disintesis oleh peneliti lain yakni Emerson, Napatchi, dan Balogh (2012) memberikan definisi yang lebih luas tentang collaborative governance ialah proses dan struktur pengambilan keputusan dalam kebijakan dan administrasi publik yang melibatkan masyarakat secara konstruktif. Ini telah banyak digunakan sebagai referensi ketika membahas tata kelola sosial. Institusi publik, berbagai tingkat pemerintahan dan/atau ruang publik, privat dan privat untuk mengimplementasikan tujuan publik yang tidak dapat dicapai di luar forum bersama. Dengan kata lain, kolaborasi menggambarkan dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mengelola sumber daya yang sama. Hal ini sulit dicapai jika dilakukan secara individual.

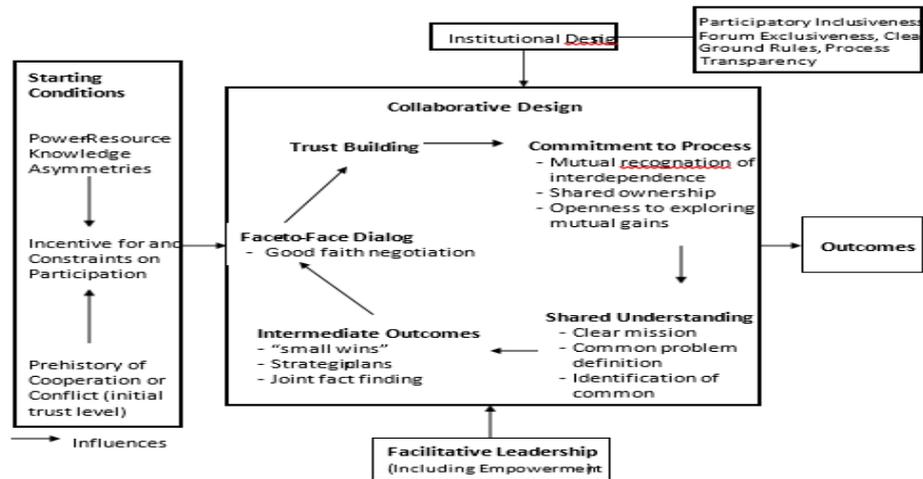
Menurut Agranof & McGuire (2009), tata kelola kolaboratif terlalu menekankan pada kerja sama sukarela dan hubungan horizontal antara peserta

lintas disiplin. Ini karena tuntutan klien seringkali melebihi kemampuan dan peran dari satu badan publik, yang membutuhkan interaksi antar organisasi. Partisipasi dalam berbagai organisasi afiliasi dan kegiatan umum. Kerja sama diperlukan untuk mengatur tata kelola sehingga dapat secara efektif memenuhi permintaan yang tumbuh yang timbul dari tata kelola lintas batas pemerintah, organisasi dan sektoral.

Menurut Bingham (2010), “Kolaborasi berarti bekerja sama lintas batas dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam hubungan multi-sektoral, multi-lembaga.” Ini menggambarkan implikasi dari tindakan kolaboratif yang melibatkan banyak aktor yang saling membantu untuk mencapai tujuan, dan para aktor ini bekerja tidak hanya di satu domain, tetapi di beberapa domain yang di sisi lain adalah sistem pemerintahan. Oleh karena itu, tata kelola kolaboratif adalah sistem pemerintahan yang menggunakan teknik kolaboratif dengan melibatkan entitas pemerintah dan non-pemerintah yang beroperasi di berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Melihat berbagai pengertian yang telah dijelaskan dalam kaitannya dengan tata kelola kolaboratif, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan kerja sama muncul terutama dari saling ketergantungan yang ada di antara para pihak atau pemangku kepentingan. Tata kelola kolaboratif dapat dijelaskan sebagai proses yang melibatkan pembagian norma dan interaksi yang saling menguntungkan antara aktor tata kelola. Melalui perspektif tata kelola kolaboratif, tujuan berwawasan ke depan masing-masing pihak dapat dicapai. (Modjo, 2020)

**Gambar 1.3**

**Model Collaborative Governance menurut Ansell & Gash**



Sumber: *Model of Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008)

Model tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) terdiri dari beberapa tahapan:

1. Kondisi awal

Pada tahap conditional pertama dari hubungan pemangku kepentingan, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda, yang dapat menyebabkan asimetri dalam hubungan yang dilaksanakan.

2. Kepemimpinan yang fasilitatif

Dalam Ansel and Gash, Ryan mengidentifikasi tiga elemen kepemimpinan kolaboratif yang efektif:

- a. Manajemen yang tepat dari proses kolaboratif.
- b. Mengelola kemampuan untuk mengimplementasikan kehandalan teknis.
- c. Pastikan kolaborasi dimungkinkan untuk membuat keputusan yang menarik dan dapat dipercaya untuk semua orang aktor.

3. Desain kelembagaan

Ansel dan Gash menjelaskan bahwa desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar kolaborasi penting, yang terpenting

adalah validitas prosedur dalam proses kolaborasi. Yang harus ditekankan dalam proses kerjasama adalah pemerintah harus terbuka dan inklusif.

#### 4. Proses kolaboratif

Model proses kerjasama mengembangkan kerjasama sebagai tahapan evolusioner. Ansel dan Gash Gray mengidentifikasi tiga fase proses kolaborasi, termasuk identifikasi masalah, penetapan arah, dan eksekusi.

Tahapan *co-creation* adalah:

- a. Dialog tatap muka
- b. Membangun Keyakinan (*Confidence Building*)
- c. Fokus pada proses
- d. Berbagi pengertian
- e. Hasil sementara

#### **b. Collaborative Governance dalam Pemulihan Ekonomi UMKM**

Pemulihan ekonomi merupakan keadaan atau upaya dimana terjadi proses peningkatan pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Hal ini dilakukan setelah ekonomi tumbuh negatif atau saat ekonomi dalam negara mengalami krisis (Wicaksana, 2022). Menurut Kementerian Keuangan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk merevitalisasi sektor UMKM di masa krisis ekonomi akibat penyebaran virus Covid-19 adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau program PEN (Datupalinge et al., 2022). Program PEN menekankan pada berbagai tujuan, yang terpenting dalam pelaksanaan program PEN adalah upaya untuk memastikan, melindungi, menyelamatkan, memperkuat dan mengembangkan kapasitas ekonomi para wirausaha atau wirausahawan di era pandemi Covid-19 (Soleha, 2020).

Terdapat prinsip dalam pelaksanaan program PEN yang harus dilaksanakan. Adapun prinsip-prinsip program PEN, yakni:

- a. Berdasarkan prinsip berkeadilan sosial
- b. Seutuhnya untuk kemaslahatan serta kemakmuran rakyat, dikarenakan program ini didedikasikan seutuhnya untuk seluruh pelaku

perekonomian Indonesia untuk menghasilkan kemanfaatan dan kegiatan masyarakat, khususnya di bidang UMKM

- c. Menciptkan, memberi peningkatan serta mempretahankan kinerja pelaku bisnis
- d. Melaksanakan kebijakan dengan hati-hati, tata kelola yang baik, transparansi, keadilan dan akuntabilitas
- e. Tidak menimbulkan risiko moral ekonomi yang dalam wacana ekonomi merupakan persepsi bahwa satu pihak menanggung risiko tambahan dalam aktivitas transaksional yang akan berdampak negatif pada pihak lain selama periode waktu tertentu
- f. Pembagian biaya dan risiko antar pemilik kepentingan sesuai dengan tugas dan wewenangnya (Soleha, 2020)

DeSeve (Moore, 2009) menyatakan bahwa ada delapan faktor kunci yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan jaringan atau kolaborasi dalam tata kelola, dan delapan faktor tersebut antara lain:.

### **c. Indikator Keberhasilan Collaborative Governance**

DeSeve (Moore, 2009) menyatakan bahwa ada delapan faktor kunci yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan jaringan atau kolaborasi dalam tata kelola, dan delapan faktor tersebut antara lain:

#### *1. Network Structure* (Struktur jaringan)

Ini mencerminkan elemen fisik jaringan yang ditangani dan menggambarkan deskripsi konseptual tentang hubungan antara satu elemen dan elemen terintegrasi lainnya. Kedua, dalam tata kelola kolaboratif, elemen jaringan tidak boleh membentuk hierarki. Artinya, mereka tidak boleh memiliki otoritas dari satu pihak. Oleh karena itu, dalam pemerintahan yang kooperatif, jaringan harus bersifat organik dengan struktur jaringannya masing-masing. Dengan kata lain, tidak ada hierarki kekuasaan, kontrol, atau monopoli. Oleh karena itu, semua pihak memiliki hak, tugas, tanggung jawab, kekuasaan, dan kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan bersama.

## 2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)

Komitmen pada tujuan bersama adalah *raison d'être* dari jaringan. Ini adalah minat dan komitmen untuk mencapai tujuan positif yang dilakukan bersama. Tujuan ini biasanya ditemukan dalam keseluruhan misi organisasi pemerintah. Selain itu, janji tidak boleh berpihak pada pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini berarti setiap kerjasama yang ada hanya menguntungkan satu pihak saja. Dengan demikian, upaya yang ditemukan dalam pemerintahan koperasi harus untuk kebaikan bersama dengan mencari solusi bersama.

## 3. *Trust Among The Participants* (Kepercayaan)

Kepercayaan antara peserta adalah hubungan profesional atau sosial di mana peserta bergantung pada informasi dan upaya pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan lainnya dalam jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah keyakinan saya. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan harus saling percaya karena dalam hal ini merupakan bentuk hubungan profesional yang diciptakan untuk keberhasilan pelaksanaan tata kelola kolaboratif.

## 4. *Governance*

Tata kelola adalah hubungan saling percaya antara tata kelola atau lembaga pemerintah. Selain itu, setiap pemangku kepentingan memiliki aturan yang disepakati bersama dan bebas memutuskan bagaimana kolaborasi tersebut akan dilakukan. Dalam hal ini, tata kelola adalah tata kelola jika jelas siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan.

## 5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)

Akses ke kekuasaan berarti ketersediaan ketentuan yang jelas dan diterima secara luas untuk tindakan atau prosedur. Oleh karena itu, ada aturan otoritas yang jelas dan diterima.

## 6. *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas)

Akuntabilitas/tanggung jawab distributif adalah tentang membangun, mengelola, dan mengelola dengan pemangku kepentingan, berbagi banyak keputusan dengan semua anggota jaringan, dan berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setiap pemangku kepentingan (termasuk masyarakat) harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.

#### 7. *Information Sharing* (Berbagi Informasi)

Berbagi informasi adalah akses yang mudah dan privasi terlindungi bagi anggota selama dapat diterima oleh semua pihak, namun akses dibatasi untuk non-anggota. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif membutuhkan pembagian informasi yang jelas dan akses informasi yang mudah bagi setiap pemangku kepentingan.

#### 8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)

Akses ke sumber daya mengacu pada ketersediaan sumber daya keuangan, teknis, manusia dan lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan jaringan. Oleh karena itu, sumber daya harus jelas dan tersedia untuk setiap pemangku kepentingan yang terlibat.

### **1.7 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah makna konsep yang digunakan untuk membantu peneliti mengoperasionalkan konsep dalam penelitian mereka. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

#### 1. *Collaborative Governance*

Setelah pemahaman yang mendalam dari berbagai sumber, definisi konseptual dari collaborative governance adalah mengatasi masalah publik melalui kerjasama atau kemitraan dengan komunitas dan lembaga swasta lainnya untuk meningkatkan kualitas hasil program, dan ini adalah inisiatif pemerintah dalam hal ini. Kegiatan dilakukan. Dengan kata lain,

program/kegiatan yang dilakukan bersama dapat memajukan kepentingan masing-masing organisasi dalam mencapai tujuan bersama.

## 2. Pemulihan Ekonomi

Berdasarkan pengertian dan definisi dari para peneliti terdahulu, maka dapat diturunkan definisi pemulihan ekonomi sebagai tindakan yang dilakukan akibat penurunan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari yang dicapai pada masa lalu. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan ekonomi di seluruh dunia menurun tajam. (Hendarsyah, 2021).

### 1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah atribut, properti atau nilai dari objek kegiatan yang memiliki perbedaan spesifik dan didefinisikan oleh peneliti yang diteliti dan dari mana kesimpulan ditarik. Menurut (Pichardo, 1997) terdapat karakteristik untuk mengidentifikasi *Collaborative Governance* yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**

**Indikator Penelitian**

<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>	<b>Keterangan</b>
1. <i>Network Structure</i>	a. Kolaborasi antar <i>stakeholders</i>	- Perjanjian, MOU, perjanjian, dll yang akan dicapai untuk pemulihan ekonomi UMKM di provinsi Bantul
	b. Sinergisitas <i>stakeholders</i>	- Penguatan organisasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan (koordinasi rapat dan rapat

		gabungan antar pemangku kepentingan) - Struktur organisasi vertikal atau hirarkis
2. <i>Commiment to a Common Purpose</i>	a. Tujuan bersama  b. Kesepahaman	- Visi, misi dan tujuan pemulihan ekonomi UKM di Bantul  - Promosi tujuan bersama dalam pemulihan ekonomi UMKM di Provinsi Bantul (direalisasikan dalam bentuk program aksi/produk kebijakan bagi pemangku kepentingan)
3. <i>Trust Among The Participants</i>	a. Profesionalitas  b. Ketepatan pelaksanaan tugas	- Implementasi rencana aksi atau kebijakan masing-masing pemangku kepentingan  - Pelaksanaan program tepat waktu, biaya dan sasaran.

4. <i>Governance</i>	<p>a. Transparansi</p> <p>b. Akuntabilitas</p> <p>c. Partisipasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan akses data untuk usaha terkait pemulihan ekonomi UMKM di provinsi Bantul</li> <li>- Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan/atau kewajiban masing-masing pemangku kepentingan</li> <li>- Pemangku kepentingan (baik berupa ide/gagasan, pendanaan, sarana maupun prasarana) berkontribusi secara aktif.</li> </ul>
5. <i>Access to Authority</i>	<p>a. Kewenangan</p> <p>b. Desain proses</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum pemulihan ekonomi UKM di Propinsi Bantul</li> <li>- Mengutamakan isu program kebijakan atau pemulihan ekonomi UMKM di Provinsi Bantul</li> <li>- Standardisasi pemulihan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah di provinsi Bantul</li> </ul>

<p>6. <i>Distributive Accountability/Responsibility</i></p>	<p>a. Penataan</p> <p>b. Pengelolaan manajemen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindakan pemulihan ekonomi untuk UKM di provinsi Bantul</li> <li>- Proses Perencanaan Evaluasi Program Kebijakan Pemulihan Ekonomi UKM di Provinsi Bantul</li> </ul>
<p>7. <i>Information Sharing</i></p>	<p>a. Kemudahan akses informasi</p> <p>b. Manajemen informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - Akses mudah ke informasi umum tentang model produk kolaborasi</li> <li>- Koordinasi antar pemangku kepentingan.</li> <li>- Sistem informasi dan komunikasi</li> </ul>
<p>8. <i>Access to Resources</i></p>	<p>a. Sumber daya manusia</p> <p>b. Sumber daya finansial (keuangan)</p> <p>c. Sumber daya sarana dan prasarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung jawab struktural</li> <li>- Kebijakan anggaran program dari pemerintah dan instansi terkait lainnya</li> <li>- Fasilitas pendukung</li> </ul>

## **1.9 Metode Penelitian**

Suatu penelitian yang baik tentunya membutuhkan sebuah instrumen atau alat untuk melakukan analisa yang biasa disebut sebagai metode penelitian. Untuk penjelasan terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara lebih mendalam sebagaimana berikut:

## **1.10 Jenis Penelitian**

Dalam menyusun karya ilmiah ini, jenis penelitian yang akan dipilih oleh penulis berupa penelitian kualitatif. Menurut pandangan Denzin & Lincoln (2011: 3-4) dalam buku (Hamdi *et al.*, 2020), penelitian kualitatif merupakan sebuah langkah guna melakukan rasionalisasi atas realitas kehidupan berdasarkan apa yang dipahami oleh peneliti yang bersangkutan. Kemudian, Huberman dalam bukunya menjelaskan bahwasannya penelitian kualitatif dilakukan melalui kontak yang intens dan berkepanjangan dengan bidang atau situasi kehidupan yang biasanya dangkal atau normal dengan mencerminkan kehidupan sehari-hari individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi (Miles & A. Michael Huberman, 1994). Lebih lanjut, metode kualitatif yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif sendiri kemudian mengkaji masalah-masalah yang muncul dalam suatu masyarakat dan tindakan-tindakan yang berlaku bagi masyarakat tersebut dalam situasi tertentu, seperti hubungan antara kegiatan, sikap, pendapat, dan proses yang merupakan bagian dari proses yang berlangsung dan mempengaruhi. fenomena masyarakat (Samsu, 2017).

Kemudian pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan ini merupakan sebuah penelitian intensif yang mengkaji satu kasus tertentu atau lebih yang dilakukan dalam kehidupan nyata berdasar keadaan sebenarnya guna tujuan tertentu melalui pengumpulan secara mendalam dengan melibatkan berbagai sumber informasi (Hamdi *et al.*, 2020). Kemudian menurut Yin (Yin, 2009), pendekatan studi kasus merupakan suatu langkah yang tepat untuk diterapkan dalam penelitian yang menggunakan inti pertanyaan penelitian berupa *how* atau *why*, kondisi peneliti yang memiliki sedikit waktu untuk

mengontrol peristiwa yang diteliti, dan fokus penelitiannya merupakan fenomena kontemporer. Penggunaan pendekatan ini juga sangat relevan dengan topik yang akan dibahas, karena nantinya akan mencari data secara mendalam terkait topik yang ada mengingat objek yang diteliti berupa bentuk collaborative governance yang mana memerlukan pendalaman dalam mencari informasi. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini dianggap membantu memberikan gambaran seutuhnya secara sistematis, faktual dan akurat dalam menjawab pertanyaan apa saja bentuk collaborative governance dalam rangka pemulihan ekonomi UMKM yang telah dilakukan oleh pemerintah pada masa endemi di kabupaten Bantul.

### **1.11 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu khususnya pada pemerintah daerah setempat, swasta dan masyarakat sebagai pelaku UMKM terkait. Peneliti memilih kabupaten Bantul sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dengan angka pasien positif *Covid* 19 tertinggi di Yogyakarta, Angka pasien positif *covid* 19 di kabupaten Bantul yang terus meningkat tentu berdampak pada beberapa aspek kehidupan masyarakatnya khususnya dalam bidang ekonomi (Karuniawati et al., 2020).

### **1.12 Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Kajian ilmiah ini akan menggunakan sumber data primer, yang mana data ini merupakan data yang didapat secara langsung dan segera diperoleh oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian, dengan kata lain data ini diperoleh langsung dari informan atau narasumber, baik itu melalui observasi maupun wawancara (Samsu, 2017). Dalam penelitian ini akan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul, PT. WABI Teknologi Indonesia serta Kepala Forum Komunikasi UMKM kabupaten Bantul.

## **b. Data Sekunder**

Penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder yang mana tersedia di berbagai sumber. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui artikel jurnal, website, media sosial terkait.

### **1.13 Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. *Pertama*, data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara. Dalam buku (Hamdi *et al.*, 2020), dijelaskan bahwasannya terdapat 5 (lima) jenis wawancara, yaitu wawancara mendalam, wawancara terarah, wawancara dengan petunjuk umum, wawancara baku terbuka, dan wawancara tidak terarah. Untuk penyusunan karya ilmiah ini sendiri nantinya akan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), sehingga informasi dapat didapatkan secara optimal.

*Kedua*, data sekunder didapat melalui jurnal penelitian terdahulu maupun media massa berupa website pemerintah kabupaten Bantul maupun media massa lain yang memiliki kaitan dengan karya ilmiah ini serta terdapat di forum internet yang sifatnya berupa data tambahan guna menguatkan dan menyempurnakan data primer yang sudah didapat.

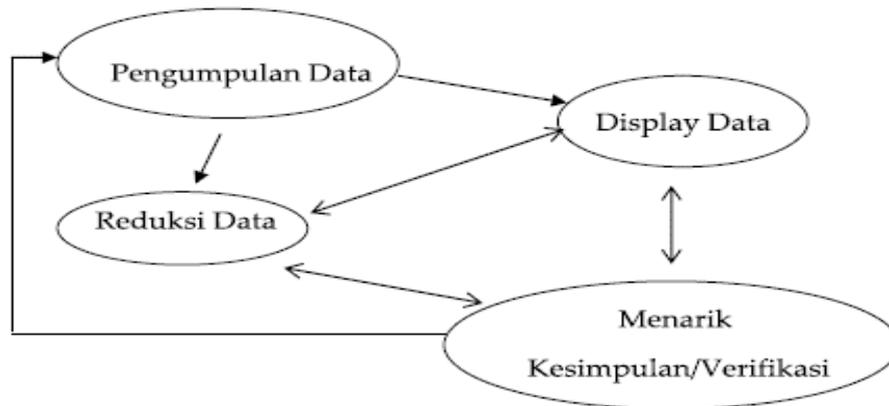
### **1.14 Teknik Analisis Data**

Analisis data sendiri merupakan salah satu proses yang dilakukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Moleong dalam (Hamdi *et al.*, 2020) menjelaskan bahwasannya analisis data merupakan suatu upaya untuk melakukan organisasi data untuk nantinya dilakukan pengolahan data peneliti dan dapat diinterpretasikan dan diceritakan kepada orang lain. Dalam melakukan proses atas data yang sudah didapat, nantinya data-data tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan model analisis interaktif. Miles dan Huberman dalam bukunya (Miles & A. Michael Huberman, 1994), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis interaktif

dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun bagan proses analisis data menggunakan model interaktif yaitu:

**Gambar 1. 4**

**Alur proses analisis model interaktif**



Sumber : (Miles & A. Michael Huberman, 1994)

#### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode dan teknik pengumpulan data seperti pada pembahasan sebelumnya. Peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi dari para pelaku yang terlibat yaitu pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pihak swasta dan juga masyarakat yang menjalankan UMKM. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara secara mendalam (*indepth interview*). Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi pustaka yang mana tentunya memperhatikan triangulasi atau sumber data.

#### **b. Reduksi Data**

Setelah data dikumpulkan dan tersusun dalam sebuah dokumen yang tersimpan, maka kemudian perlu untuk dilakukan proses reduksi data. Tahapan ini merupakan hal yang penting dikarenakan peneliti melakukan kegiatan merangkum, memilah pokok data, memfokuskan pada hal-hal yang dirasa penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk lebih banyak melakukan

pengumpulan data dan pencarian data saat diperlukan (Sugiyono, 2013). Kegiatan reduksi data ini tentunya memerlukan suatu keseriusan dan penalaran yang kritis dan cepat sehingga menjadikannya bagian yang paling sensitif dalam penelitian. Melihat kondisi ini tentunya membuat peneliti perlu berhati-hati dalam menggambarkan hasil penelitian agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Kemudian Samsu dalam bukunya (Samsu, 2017) menambahkan, bahwasannya reduksi data sendiri merupakan suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, mengeliminasi data yang dianggap tidak sesuai, dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir.

### **c. Penyajian Data**

Setelah data yang didapat sudah dianggap cukup dan sudah melewati proses analisis, maka selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data sendiri merupakan suatu usaha dalam membentuk informasi yang terkoordinir sebagai upaya untuk menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan (Samsu, 2017). Dengan penyajian data, nantinya akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram dan lain-lain. Dari penyajian data tersebut dapat menjadi sebuah tumpuan dasar untuk dijadikan sebagai bahan informasi dengan mendeskripsikan hasil temuan data tersebut dalam bentuk naratif.

### **d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi**

Langkah terakhir dalam melakukan suatu penelitian adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan berupa sebuah narasi terhadap keseluruhan hasil penelitian tersebut. Kesimpulan dalam kualitatif berisikan penemuan-penemuan atas penelitian yang dilakukan. Setelah melakukan penyajian kesimpulan tersebut, peneliti juga harus melakukan verifikasi data agar mampu meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data.

### 1.15 Unit Analisis Data

Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan pemilihan unit analisis. Unit analisis sendiri merupakan satuan yang akan diteliti dan berkaitan dengan subjek penelitian. Adapun unit analisis dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 3**  
**Unit Analisis Data**

No	Jenis Data	Narasumber	Data yang dibutuhkan	Teknik pengumpulan data
1.	Data Primer	Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul	Apa saja bentuk kolaborasi yg telah dilakukan sejauh ini, Landasan hukum, stakeholder/Lembaga yang terlibat, pola sinergitas, visi misi atau tujuan, pembagian tupoksi masing-masing Lembaga, kesepakatan tertulis (MoU), strategi, target/sasaran public, structural penanggungjawab (secara vertical/hirarkis),	Wawancara mendalam

2.	Data Primer			Wawancara mendalam
3.	Data Primer	Kepala Forum Komunikasi UMKM kabupaten Bantul	Data UMKM Bantul, perspektif para pelaku UMKM, dampak negative/positif dari aspek ekonomi, bentuk kontribusi, kemudahan akses informasi, kelebihan dan kekurangan, saran	Wawancara mendalam
4.	Data Sekunder	Artikel jurnal, website dan sosial media terkait	Infografis pendukung	Dokumentasi